



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : MOCHAMAD AGUS SYAMSUL ARIEF
NIK : 3578142608730001
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA SURABAYA
Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA PERMOHONAN
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 6 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

- Nama : MOCHAMAD AGUS SYAMSUL ARIEF
- Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA PERMOHONAN
- NHK : 97043

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.753.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/142 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.530.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 573.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 27.000.000

- MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.121.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.804.821.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.804.821.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.